



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Pemantapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, dan kegiatan Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas, terdapat ketidaksesuaian indikator kinerja utama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 28 tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Bahwadalam rangka menyesuaikan Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu merubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ; PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
- 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran II Angka Romawi I Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kapabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan aparatur pemerintah hasil survey pada tahun x	Hasil survey IKM pada semua SKPD	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya penegakan hukum	Persentase penurunan angka pelanggaran terhadap Perda	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda pada th. (n-1)} - \text{Jumlah pelanggaran Perda pada th. (n)}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda pada th. (n)}} \times 100 \%$	Hasil rekapitulasi penegakan Perda	Satuan Polisi Pamong Praja

3.	Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun (n)	Hasil penilaian/ evaluasi BPK	Inspektorat, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai / Peringkat hasil penilaian LPPD pada tahun (n) oleh Tim Kemendagri	Hasil penilaian/ Evaluasi Tim Kemendagri	Sekretariat Daerah
		Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai / Predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun (n) oleh Tim Kemen PAN-RB	Hasil penilaian/ evaluasi Tim KemenPAN-RB	Sekretariat Daerah
4.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak	Angka melek huruf (AMH)	Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal	Dinas Pendidikan
		Angka rata-rata lama sekolah	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	-sda-	Dinas Pendidikan
		Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	Jumlah siswa baru tingkat pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	Bidang Pendidikan TK dan SD, Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
		Angka melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat pada jenjang SMA/SMK/MA -----x 100 % Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan

5.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka usia harapan hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Semua Bidang pada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa / kelurahan UCI ----- x 100 % Seluruh desa / kelurahan	Bidang Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
		Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	(Kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental	Bidang Bina Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian	Persentase rumah tangga bersanitasi	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi -----x 100 % Jumlah rumah tinggal	Bidang Bina Penyehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Nilai tukar petani (NTP)	Indeks yang diterima petani (jt) ----- x 100 % Indeks yang dibayar petani	Bidang Pertanian Tanaman Pangan, BPS	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
		Nilai tukar Nelayan(N TN)	Indeks yang diterima nelayan (jt) ----- x 100 % Indeks yang dibayar nelayan	Bidang Kelautan; Bidang Perikanan Budidaya; Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, BPS	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

		Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	$\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan th. (n)} - \text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (n-1)}}{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan th. (n-1)}} \times 100$	Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
		Ketersediaan dan cadangan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Pangan : Rumus : $Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$ Dimana : $Ps = \text{Total penyediaan dalam negeri}$ $Pr = \text{Produksi}$ $\Delta St = \text{Stok akhir} - \text{Stok awal}$ $Ek = \text{Ekspor}$ Cadangan pangan tingkat kabupaten minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras	Seksi Ketersediaan Pangan, BPS	Kantor Ketahanan Pangan
7.	Berkembangnya industri olahan dan kreatif berbasis pertanian	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan th (n)} - \text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan th (n-1)}}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan th (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
		Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan th (n)} - \text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan th (n-1)}}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan th (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
8.	Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal	Persentase peningkatan kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan dalam tahun (n)} - \text{Jumlah kunjungan wisatawan dalam tahun (n-1)}}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan dalam tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Pariwisata, Bidang Pemasaran	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

9.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Cakupan kelestarian situs dan budaya lokal	Jumlah situs dan budaya lokal yang dilestarikan dalam tahun (n) ----- x 100 % Jumlah situs dan budaya lokal yang ada	Bidang Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10.	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi UKM terhadap total PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB UKM ----- x 100 % • Jumlah PDRB	Bidang UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
11.	Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah	Jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha	Jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha yang telah ditetapkan	Bidang Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
12.	Berkembangnya jejaring kekuatan ekonomi	Jumlah Kerja sama dibidang pengembangan perekonomian dengan lembaga / daerah lain	Jumlah MOU di bidang pengembangan perekonomian	Rekapitulasi Jumlah MOU di Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Persentase pertumbuhan pasar tradisional	Jumlah pasar tradisional th. (n) - Jumlah pasar tradisional th (n-1) ----- x 100% Jumlah pasar tradisional th. (n-1)	Bidang Perdagangan, Bidang Industri	Dinas Pendapatan
13.	Meningkatnya infrastruktur dan tata ruang	Persentase sawah terairi melalui jaringan irigasi	Luas sawah terairi jaringan irigasi teknis -----x 100 % Luas sawah	Bidang Pembangunan dan Pengembangan	Dinas PU Pengairan

		Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ----- x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah perkotaan	Luas Ruang Terbuka Hijau ----- x 100 % Luas wilayah perkotaan	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Dokumen tata ruang yang tersedia ----- x 100 % Rencana peruntukan	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas th. (n-1) – Jumlah kecelakaan lalu lintas th. (n) ----- x 100 % Jumlah kecelakaan lalu lintas th. (n)	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
14.	Meningkatnya akses transportasi dan informasi	Tingkat pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) dalam pelayanan publik	Jumlah aplikasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik -----x 100 % Jumlah aplikasi yang ada	Bidang Komunikasi ,Bidang Informasi dan Data	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
15	Meningkat Nya investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp)	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/ PMA)	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

		Pertumbuhan investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n) - Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n -1) ----- x 100% Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n-1)	Bidang Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
16.	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	Jumlah penduduk miskin ----- x 100 % Jumlah penduduk	Bidang Sosial, BPS	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah yang menganggur -----x 100 % Jumlah angkatan kerja	Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas, BPS	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17.	Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat	Persentase pertumbuhan kelompok masyarakat aktif	Jumlah kelompok masyarakat aktif dalam th. (n) - Jumlah kelompok masyarakat aktif dalam th. (n-1) ----- x 100% Jumlah kelompok masyarakat aktif dalam th. (n-1)	Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
18.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Mengungkapkan disparitas gender dalam 3 komponen IPM/HDI (masa hidup, pendidikan dan pendapatan) Rumus : $IPG = 1/3 [X_{ede (1)} + X_{ede (2)} + I_{inc-dis}]$ Dimana : $X_{ede (1)}$: Harapan Hidup $X_{ede (2)}$: Pendidikan $I_{inc-dis}$: Indeks Distribusi Pendapatan	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

			<p>dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.</p> <p>Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) ada tiga komponen penyusun IDG, yaitu :</p> <p>keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.</p> <p>Rumus :</p> $IDG = 1/3 [I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis}]$ <p>Dimana :</p> <p>I_{par} : Indeks keterwakilan di parlemen</p> <p>I_{DM} : Indeks pengambilan keputusan</p> <p>$I_{inc-dis}$: Indeks Distribusi Pendapatan</p>		
		Jumlah Perda/Perbup yang mendukung perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Perda/Perbup yang mendukung perlindungan perempuan dan anak yang telah ditetapkan	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
19.	Berkembangnya program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan PMKS	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Tahun (n-1)– Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Tahun (n) ----- x 100 % Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Tahun (n)	Bidang Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase penduduk mempunyai jaminan sosial	Jumlah penduduk yang memperoleh jaminan sosial ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk yang seharusnya memperoleh jaminan sosial	Bidang Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

20	Meningkat nya pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan	Persentase hutan dan lahan yang bebas dari kritis	Luas hutan dan lahan yang bebas dari kritis ----- x 100 % Luas total hutan dan lahan kritis	Bidang Kehutanan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
----	---	---	--	---------------------	--

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI BANYUWANGI,
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
ttd
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR